

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya daerah otonom karena terdapat perubahan pengelolaan belanja dan anggaran dimana daerah dituntut lebih mandiri dalam mengelola dan belanja modal untuk kepentingan daerah dan publik. Perubahan pada sistem juga sangat terasa dari sistem tradisional dan sekarang beralih ke sistem berbasis kinerja. Otonomi daerah juga dilandasi karena faktor perbedaan potensi dan sumber daya yang bertujuan demi kepentingan baik itu untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk belanja kebutuhan pelayanan publik. Keadaan ini menimbulkan pendapatan masing-masing daerah itu berbeda-beda. Sehingga alasan inilah yang membuat tingkat ketergantungan dana terutama yang bersumber dari daerah yang lainnya. Perkembangan perekonomian menjadi parameter yang paling utama untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat diimbangi dengan pengetahuan berkaitan dengan teknologi sebagai suatu keberhasilan dalam hal pembangunan (Harahap, 2018). Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah mengetahui tingkat kebutuhan dasar masyarakat berupa bahan pokok makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi suatu negara kurang baik maka akan berdampak pada seluruh masyarakat karena masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dengan adanya sistem desentralisasi daerah yang dilakukan pemerintah pusat dengan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dengan tujuan agar setiap daerah lebih mampu dan mandiri dalam mengurus rumah tangga tanpa ketergantungan dengan pemerintah pusat karena pemerintah daerah sangat mengetahui kondisi suatu daerah baik kekayaan alam yang dimiliki maupun faktor pendukung seperti sumber daya manusia yang mendiami suatu wilayah. Baik atau buruknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dari hasil kerja dan kinerjanya. Menurut Suwandi & Tahar (2015) mendefinisikan kinerja keuangan adalah capaian kerja yang telah dilaksanakan oleh para aparatur daerah dan parameter yang digunakan berupa rasio keuangan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah di periode sebelumnya dan mempengaruhi di periode selanjutnya

Pengukuran yang telah dikemukakan oleh para pakar di bidang keuangan menjelaskan hal terpenting yang dinilai dari kinerja adalah bagaimana keahlian pemerintah untuk menyerap anggaran dalam periode tertentu (Halim, 2002). Hasil kinerja pemerintah daerah baik atau buruknya dengan melihat program-program kerja yang dilaksanakan seperti pertumbuhan ekonomi dengan melihat pendapatan per kapita yang berdampak pada kemiskinan. Kinerja pemerintah daerah yang baik atau buruk akan berdampak langsung terhadap setiap pembangunan ekonomi dan kemiskinan. Kinerja

pemerintah daerah yang baik akan mempengaruhi laju perekonomian terutama akses masyarakat dalam mendapatkan barang-barang pokok yang dibutuhkan. Program penting yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah adalah mengatasi tingkat kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai suatu ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya karena pendapatan dan pengeluaran per kapita masih dibawah garis kemiskinan.

Dalam penelitian ini fokus utama peneliti yaitu pada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 22 kabupaten/kota Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik provinsi NTT pada tahun 2017 sampai 2019 pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi provinsi NTT pada tahun 2017 sebesar 5,11%. Sedangkan pada tahun dan mengalami peningkatan sebesar 5,13% atau naik 0,2 % tahun 2018. Dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 5,20%. Pertanian merupakan sektor usaha utama yang memberi sumbangan terbesar pada pertumbuhan ekonomi provinsi NTT. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk meningkatkan PDRB sebesar 28 persen dan itu terjadi pada tahun 2019. Sedangkan *real estate* memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0 persen (BPS,2020). Dan berkaitan dengan data kemiskinan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin selama tiga terakhir mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan sebesar 21,38% pada tahun 2017 dan mengalami penurunan 0,35% di tahun 2018 dan pada tahun 2019 menurun

sebesar 20,62%. Angka kemiskinan NTT tahun 2019 dikategorikan tinggi karena dibanding rata-rata keseluruhan yang sebesar 9,22 persen. Ini artinya harus ada Upaya yang maksimal dan peran penting pemerintah untuk memberantas kemiskinan.

Dari hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Diyah Nugraheni dan D.S. Priyarsono (2012) menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan penyediaan infrastruktur memiliki hubungan yang positif. Sedangkan, antara infrastruktur dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang negatif. Sedangkan hasil yang diteliti oleh Niken Ning Tias (2015) adanya dampak negatif terhadap kemiskinan yang diukur oleh tingkat kemandirian dan keserasian biaya modal dan dampak yang positif efektivitas pada kemiskinan dan efisiensi tidak mempengaruhi penurunan kemiskinan. sedangkan Putriani (2014) menjelaskan bahwa kemandirian dapat berdampak terhadap kemiskinan. Sedangkan efektivitas dan efisiensi tidak berdampak menurunkan kemiskinan.

Dari uraian diatas telah menjelaskan permasalahan yang akan diteliti sehingga judul yang diangkat adalah “ Pengaruh Kinerja Keuangan daerah Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2019”

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yang berlandaskan pada latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana mendeskripsikan setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ?
2. Bagaimana pengaruh kinerja Pemerintah daerah yang berdampak meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaimana pengaruh kinerja Pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
4. Bagaimana pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan penjelasan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mendeskripsikan setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.
2. Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Untuk menganalisis pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini yang diberikan pada pihak-pihak yang berkepentingan dan para pemerintah daerah adalah:

1. Hasil pada penelitian ini dijadikan bahan acuan dan manfaat bagi para peneliti berikutnya terutama kaitannya pengelolaan pemerintah daerah, pertumbuhan perekonomian dan kemiskinan.
2. Dijadikan acuan bagi para pembuat kebijakan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dapat memberikan informasi faktual terutama keterkaitan antara kinerja pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian yang berdampak mengurangi kemiskinan.
3. Dapat memberikan informasi tambahan dan wawasan yang berguna bagi masyarakat untuk menilai pengelolaan keuangan daerah yang berdampak terhadap meningkat perekonomian dan mengurangi penduduk miskin..
4. Sebagai informasi atau referensi bagi Mahasiswa/i Pascasarjana Universitas Merdeka Malang khususnya mahasiswa/i program studi Magister Akuntansi yang ingin meneliti lebih lanjut berkaitan dengan

kinerja keuangan daerah yang berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.